

**AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH  
DATANGNYA KASUS PEMILU 2024 DILIHAT DARI TAHUN 2019**

Tasya Crisanti Manalu, Rena Nur Aliya Yunilafaiza, Alleanda Ria Paramitha, Niken Salsavita, Ari Metalin Ika Puspita

Progam studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

tasya.23153@mhs.unesa.ac.id,

**Abstrak**

Pancasila sebagai pedoman dalam tingkah laku dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. dalam keberlangsungannya nilai Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktualisasi berarti suatu tindakan untuk merelasikan akan pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan sehari-hari. Jadi, aktualisasi Pancasila adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila merupakan hal penting sebagai bentuk-bentuk melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk aktualisasi adalah ikut serta dalam pemilu. pemilu adalah proses demokrasi, sarana komunikasi politik masyarakat. Pemilu terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas pemilu dan nilai-nilai Pancasila. artikel ini membahas tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah datangnya kasus 2024 dilihat dari tahun 2019 serta solusi dari permasalahan kasus tersebut.

Kata kunci; Aktualisasi Pancasila, Pemilu, Nilai Pancasila

**Abstrak**

Pancasila as a guide to behavior in society, nation and state. in its continuity, the value of Pancasila should be applied in our daily lives. Actualization means an action to correlate the understanding of values and norms with daily actions. So, the actualization of Pancasila is the implementation of the value of Pancasila which is realized in the life of the nation and state. Actualization of Pancasila is important as a

form of preserving the values of Pancasila so that the next generation of the nation can still live and practice the values of Pancasila. One form of actualization is participating in elections. elections are a democratic process, a means of political communication of society. elections are carried out properly if their implementation is in accordance with the principles of election principles and the values of Pancasila. this article discusses the actualization of the values of Pancasila in preventing the coming of the 2024 case seen from 2019 and the solution to the problem of the case.

Keywords; actualization of Pancasila, Election, Pancasila Value

## **PENDAHULUAN**

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Adanya suatu demokrasi bersumber dari pancasila yang digunakan sebagai pembuat keputusan yang dibuat pemerintah dan dapat menguntungkan rakyat. Didalam demokrasi pemilu adalah prosedur utama yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah. Dalam hal ini rakyat memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang baik.

Berikut Nilai-nilai luhur pancasila dalam penyelenggaran pemilu:

1. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap individu diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya berdasarkan keyakinan agamanya dan pilihan politiknya, oleh karena itu harus saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan terhadap orang lain.
2. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hak memilih dalam pemilu merupakan hak pilih universal yang penggunaannya dijamin secara berkeadilan untuk semua warga negara yang telah memenuhi syarat dan bagi calon-calon pemimpin untuk berkontestsai sekaligus merebut kekuasaan secara beradab.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi pedoman bagi pemilih dan kontestan dalam pemilu agar menjaga persatuan dan kerukunan dalam menggunakan hak pilih dan berkompetisi. Kemudian Memelihara suasana pemilu dalam kondisi aman damai, mampu meredam konflik, dan tidak memepertajam pembilahan identitas yang mengancam persatuan dan kresatuan bangsa.

4. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah dasar adanya pemilu dan demokrasi. Pemilu merupakan proses memilih pemimpin, dari, oleh, dan untuk rakyat.

5. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi acuan bagi peserta Pemilu dan pemilih untuk menjunjung keadilan. Untuk terwujudnya keadilan dalam Pemilu para peserta Pemilu (parpol dan calon) dilarang melakukan pembelian suara atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok pemilih.

Pemilihan umum harus relevan dengan nilai Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan berlandaskan Pancasila warga negara dapat mempertimbangkan untuk memilih bahwa pemimpin yang terpilih memiliki komitmen yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun faktanya, sistem pemilu di Indonesia dinilai belum jujur dan adil. Masih banyak sekali kasus pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu contoh dari adanya pelanggaran pemilu adalah masih banyak terjadi calon yang memberikan uang kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan dan dipilih.

Pelaksanaan pemilu adalah salah satu perwujudan Pancasila sila ke-4 yang yang direpresentasikan secara nyata dengan asas LUBER JURDIL menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. LUBER JURDIL diartikan Langsung dengan arti pemilih berhak untuk secara langsung atau tanpa diwakili dalam memilih kandidat yang sesuai. Umum dengan arti bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak untuk memilih kandidat dengan ketentuan pemilu yang ada. Bebas dengan arti tidak ada unsur pemaksaan dalam pemilihan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Rahasia dengan arti suara yang diberikan tidak perlu di beri identitas pemilih dan juga pemilihan bersifat pribadi sesuai dengan keinginan hati. Jujur dengan arti bahwa pemilu dilakukan secara jujur dan terhindarkan kecurangan terjadi di tengah pemilu. Adil dengan arti diperlakukan sama bagi seluruh pemilih serta peserta pemilu sendiri.

Aktualisasi Nilai Pancasila merupakan sebuah pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbagai kalangan di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila memiliki nilai kajian yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di

Indonesia. Nilai-nilai didalam Pancasila bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, bersumber dari karakteristik bangsa Indonesia. Dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai pancasila dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai pancasila ini dapat menjadi bekal bagi anak bangsa dalam mengembangkan Negara khususnya dalam berdemokrasi Karena dalam nilai pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang telah sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang telah disusun dengan matang.

Landasan nilai berasal dari Pancasila. Harus selalu mengikuti moralitas manusia dalam kehidupan bernegara, termasuk kehidupan pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial, hukum budaya, perlindungan dan keamanan serta kehidupan beragama. Sila keempat menyatakan keutamaan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, itikad baik dan rasa tanggung jawab. Kesepakatan luhur para wakil rakyat diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia yang merupakan penerapan dari Pancasila.

Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Permusyawaratan/ Perwakilan ini ditegaskan pula bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Widodo (2015: 680), mengemukakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa atas negara Indonesia. Itu artinya seluruh rakyat juga berhak untuk menjadi pemimpin di pemerintahan.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila merupakan screening-board, standard guidelines berupa check-list yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya sebagai justification tool terhadap setiap perilaku, hasil pengujian yang berkaitan dengan Kelima Sila Pancasila harus bersifat positif, tidak boleh ada yang negatif.

Pengambilan keputusan final ditentukan secara kasuistis, dengan menilai kecenderungan yang positif.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan secara kualitatif. Teori-teori yang dirujuk dipilih sesuai dengan topik yang relevan. Sumber-sumber data diambil melalui studi literatur. Data-data yang ada diolah dengan menganalisis teori-teori dan penelitian dari peneliti sebelumnya. Analisa terhadap masalah

yang diangkat di dalam penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan angka namun

menggunakan referensi dari berbagai sumber yang ada yang sesuai dengan topik yang diangkat di dalam penelitian. (Salurante, 2022).

Metode aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah datangnya kasus pemilu 2024 dilihat dari tahun 2019 yang digunakan dengan mengumpulkan studi literatur dengan mengumpulkan data dari sumber terpercaya seperti jurnal, artikel dan publikasi yang terkait

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PKPU No.7 Tahun 2017 Pasal 1 yaitu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jokowi menjelaskan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Namanya saja pesta demokrasi, maka harus disambut dengan cara-cara beradab, cara-cara yang beretika, cara-cara yang bertata krama, dan cara-cara yang berbudaya. Sebagai bangsa yang besar dalam menghadapi pemilu pilpres penting untuk aktif dalam proses demokrasi dengan memahami platform calon, memberikan suara berdasarkan nilai, dan penyebaran hoaks. Di Indonesia salah satu cara untuk mengambil keputusan termasuk untuk memilih pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilu 2024 harus diimplementasikan dengan sikap positif dalam menghadapi isu-isu politik. DBS Asian Insights Forum 2023 paparkan bahwasannya kondisi politik nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang saling memengaruhi jelang pemilu tahun politik 2024. Tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen yang dinilai akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi RI tahun depan.

## KASUS PEMILU YANG TERJADI DITAHUN 2019

### 1. Politik uang

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meneliti melalui surveinya bahwasannya pengaruh politik uang dalam pemilu 2019 mencapai 40% responden menerima uang dari para peserta pemilu 2019. Djayadi mengatakan, masyarakat memandang demokrasi sebagai bagi-bagi rezeki ketika pemilu berlangsung. tetapi tidak mempertimbangkan tetap memilih mereka. Hal ini telah banyak ditemukan di kalangan Masyarakat, saat adanya pemilu dilakukan bakal calon akan memberikan uang atau barang berbentuk apapun yang dimaksudkan sebagai umpan kepada Masyarakat agar saat nanti pemilihan mereka yang dipilih. Hal ini sering terjadi di beberapa daerah tertentu yang penduduknya rentan terpengaruh.

### 2. GOLONGAN PUTIH ATAU GOLPUT

Tindakan seseorang tidak memberikan hak suaranya untuk memilih. Tidakan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah tidak puasnya dengan kandidat calon yang ada. Hal ini bisa terjadi karena visi misi yang di sebutkan tidak ada yang cocok atau memang tidak sesuai dengan keinginan. Dari tahun ketahun golput menjadi persoalan yang selalu ada setiap adanya pemilu, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka golput pada tahun 2019 dengan jumlah golput 34,75 juta atau 18,02 persen dari total pemilih menjadikan tahun dengan angka golput yang rendah dari sebelumnya yakni pada tahun 2014 dengan jumlah golput 58,61 juta atau 30,22 persen. Pada pemilu yang akan datang pemilih yang terdaftar didominasi oleh kawula muda dengan prosentase 56,4 persen dikutip dari data KPU. Jumlah tersebut telah melebihi jumlah setengah dari Daftar Pemilih Tetap(DTP).

### 3.KAMPANYE HITAM BLACK CAMPAIGN

Kampanye hitam ini bertujuan untuk menjatuhkan dan melakukan pembunuhan karakter seorang calon dengan memaparkan isu yang tidak benar dan tidak didukung bukti (fitnah). Gelombang pasang media sosial (medsos) dalam konteks ini membantu penyebaran materi lebih cepat dan luas. Dalam praktik kepimiluan di Indonesia kampanye hitam dilarang oleh undang-undang dalam UU No. 7 tahun 2017 yaitu pasal 280 ayat 1 huruf c dan d. Huruf c menyebutkan bahwa dalam berkampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta

pemilu yang lain. Sedangkan huruf d menembangkannya dengan klausul menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Pelanggaran atas larangan ini merupakan tindak pidana. Menurut pasal 521, sanksinya berupa pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

## SOLUSI PERMASALAH PEMILIHAN UMUM SESUAI DENGAN NILAI AKTUALISASI PANCASILA

Permasalahan permasalahan yang terjadi dalam pemilu terjadi karena kurangnya sistem pengawasan, aturan serta sistem dari pemilu. Perlu dilakukannya sosialisasi politik, kampanye, diskusi, debat, survey guna meningkatkan partisipasi politik rakyat yaitu edukasi politik rakyat dari bebrbagai media dengan begitu masyarakat memiliki pengetahuan akan calon pemimpin. Kontrol sosial rakyat akan transparansi dalam pemilihan umum seperti pengaduan, pelaporan, pengaduan maupun demonstrasi

Solusi lain dari permasalahan dengan cara masyarakat harus bijaksana dalam menghadapi permasalahan pemilu seperti politik uang, golput dan juga kampanye negative dengan memilih pemimpin yang dilihat dari visi misi, rekam jejak, bukan karena uang, suap, atau pun politik uang lainnya. Masyarakat harus paham akan penggunaan hak suara dengan bijak dan bertanggung jawab guna untuk kemajuan bangsa Indonesia.

## PENUTUP

## SIMPULAN

Aktualisasi Pancasila sangatlah penting ditaerapkan dalam kehidupan sehari hari bukan hanya Ketika Pemilu. Namun, aktualisasi Pancasila dalam pemilu juga meruakan hal penting untuk menghindari adanya kasus pemilu yang tidak sesuai dengan asas pemilu, tidak adil, tidak berintegras dan juga tidak damai. Aktualisasi dapat dilakukan dengan cara mengiinfelmentasikan nilai nilai Pancasila dalam berperilaku, toleransi, mufakat, jujur dan persatuan kesatuan bangsa. Tidak adanya pemikiran untuk kepentingan individu dan keuntungan diri sendiri. Aktualisasi nilai

nilai Pancasila ini harus dimulai dari diri sendiri, pemikiran diri sendiri, dukungan pemerintah dan juga masyarakat banyak

#### SARAN

Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pemilu 2024 agar tidak terjadi kasus pemilu seperti pemilu sebelumnya. Sebagai masyarakat yang memiliki kekuatan suara, harus memiliki sikap kritis terhadap permasalahan dalam pemilu. Permasalahan seperti politik uang, golongan putih atau golput, kampanye hitam black campaign. Perlu adanya pemahaman akan masalah-masalah dalam pemilu serta pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan pemahaman akan Pancasila akan mendorong pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan baik, baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam pemilu

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. SDIP, 1-6.
- Aulia, T., & Dewi, D. A. (2022). Aktualisasi Nilai Pancasila di Era Globalisasi : Tinjauan Aktualisasi Pancasila dalam Penggunaan Teknologi di Kalangan Generasi Muda. J-PSH, 363-370.
- Harianto, G. S. (2015). Implementasi dan Aktualisasi Pancasila. pusdik, 1-6.
- Salsabila, D. M. (2022). Penerapan Nilai-nilai Pancasila Pada Generasi Milenial di Media Sosial. OSF, 1-16.
- Salurante, D. d. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No.2, 473-480.
- Sitabuana, T. H., Ruchimat, T., & Sanjaya, D. (2023). Upaya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Disparitas Etika dan Budaya Akibat Media Sosial. Jurnal Serina Sosial Humaniora, 130-138.

Utomo, V. B., & Widodo, S. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Era Revolusi Industri 4.0. *JPEE*, 1-120.

Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. *CIVIS*, 5(1/Januari).